



2020

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER III



VISI BPKP

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

LAP – 9 /PW07/1/2021
Tanggal 8 Januari 2021

PERWAKILAN
BPKP PROVINSI
SUMATERA
SELATAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**Laporan Barang Milik Negara
Semester II**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun
Palembang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 8 Januari 2021

Kepala Perwakilan,



Tri Handoyo
NIP. 19650422 198503 1 001

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	
A. PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum	1
2. Entitas Pelaporan	2
3. Periode Laporan	3
B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	3
1. Kapitalisasi	3
2. Penyusutan Aset Tetap	4
C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	5
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	6
1. Saldo Awal	6
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	6
3. Barang Milik Negara Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020	17
E. INFORMASI BMN LAINNYA	20
1. Perkembangan Nilai BMN	20
2. Informasi Pengelolaan BMN	20
3. BMN dari Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	20
4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum	21
5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain	21
6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	21
7. BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	21
LAMPIRAN	
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA	
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA <i>INTRAKOMPTABEL</i>	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA <i>EKSTRAKOMPTABEL</i>	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN	
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD	
LAPORAN BARANG BERSEJARAH	
LAPORAN PENYUSUTAN	
LAPORAN BARANG HILANG	
LAPORAN BARANG RUSAK BERAT	
LAPORAN BPYBDS	
BERITA ACARA REKONSILIASI (DJKN)	
BERITA ACARA REKONSILIASI (KPKNL)	

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 Perubahan Ketiga atas PMK No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 125 /PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK/TP sebelum TA 2011;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK 1 /PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual ;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.05/2015 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pemerintah Pusat;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- s. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- t. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- u. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-52/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014.

2. Entitas pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit akuntansi dengan fungsi rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dan disajikan untuk periode 31 Desember 2020.

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kapitalisasi

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN periode 31 Desember 2020 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan periode 31 Desember 2020 sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar:

- a. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- b. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Periode Semester II Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Nilai BMN gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) yang disajikan pada periode Semester II Tahun 2020 ini adalah sebesar Rp126.166.490.690,00 (Seratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan ribu puluh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Semester II Tahun 2020 terdapat mutasi tambah dan kurang.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (*Intrakomptabel*, *Ekstrakomptabel*, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK-SIMAK pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA LAPORAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020

1. Saldo Akhir

Nilai BMN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp126.166.490.690,00 Jumlah ini terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp126.166.003.690,00 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp487.000,00.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp336.643.651,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp448.114.926,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp111.471.275,00 jumlah tersebut dapat dirinci:

Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
117111	Barang Konsumsi	Rp314.018.860	Rp416.279.766	Rp102.260.906
117113	Barang untuk Pemeliharaan	Rp2.692.876	Rp9.963.430	Rp7.267.554
117114	Suku Cadang	Rp0	Rp0	Rp 0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp0	Rp0	Rp 0
117131	Bahan Baku	Rp0	Rp0	Rp 0
117199	Persediaan Lainnya	Rp19.931.915	Rp21.874.730	Rp1.942.815
Jumlah		Rp336.643.651	Rp448.114.926	Rp111.471.275

Tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak berat dan usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 Rp95.028.719.000,00 untuk 21.873 M²/ 14 persil. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal nilai sebesar Rp95.028.719.000,00 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini. Tidak terdapat tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

c. Peralatan & Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2.477 unit sebesar Rp7.590.032.155,00 Jumlah tersebut berasal dari saldo awal sebanyak 2.415 unit sebesar

Rp6.937.585.635,00 terdapat mutasi tambah pada kelompok ini sebanyak 62 unit dengan nilai sebesar Rp652.446.520,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) **3.01. Alat Bantu**

Saldo Alat Bantu berupa alat besar Genset dan Water Pump pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode Semester II Tahun 2020.

Tidak terdapat Alat Bantu (alat besar) yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	5 Unit	Rp360.886.502,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) **3.02. Alat Angkutan**

Saldo Alat Angkutan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp1.286.994.100,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 Unit dengan nilai sebesar Rp1.286.994.100,00.

Jumlah alat angkut kendaraan roda empat berupa minibus sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp1.147.290.000,00, sedan 1 unit dengan nilai sebesar Rp65.120.000,00 dan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp 74.584.100,00, Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020.

Tidak terdapat Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	7 Unit	Rp 1.147.290.000
Baik	1 Unit	Rp 65.120.000
Rusak Ringan	5 Unit	Rp 74.584.100
	13 unit	Rp 1.286.994.100

Tidak terdapat pada kelompok Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah / Penghapusan BMN

3) 3.03. Alat Bengkel & Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp30.050.000,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp550.000,00.

Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar 29.500.000,00.

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2 Unit	Rp 30.050.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat		

Tidak ada kelompok Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4) 3.04. Alat Pertanian

Saldo Alat Pertanian pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp18.640.120,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0.

Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp18.640.120,00

Tidak terdapat alat pertanian yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Pertanian berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	11 Unit	Rp 18.640.120
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
	11 unit	Rp 18.640.120

Tidak ada kelompok Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5) **3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga**

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2.056 unit dengan nilai sebesar Rp2.798.378.847,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2.049 unit dengan nilai sebesar Rp2.740.838.847,00

Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp57.540.000,00.

Tidak terdapat Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2.056 Unit	Rp2.798.378.847,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	2.056 unit	Rp2.798.378.847,00

Tidak terdapat kelompok Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) **3.06. Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar**

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 73 unit dengan nilai sebesar Rp642.329.788,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 70 unit dengan nilai sebesar Rp546.179.788,00.

Terdapat mutasi tambah dan pada kelompok barang ini untuk Periode Semester II tahun 2020 sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp96.150.000,00.

Tidak terdapat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	72 unit	Rp 608.889.790,00
Rusak Ringan	1 unit	33.439.998,00
Rusak Berat	-	-
	73 unit	642.329.788,00

Tidak ada kelompok Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

7) **3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan**

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp66.116.500,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp7.616.500,00.

Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp58.500.000,00.

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	16 unit	Rp 66.116.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	16 unit	Rp 66.116.500,00

Tidak terdapat kelompok Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

8) **3.08. Alat Laboratorium**

Saldo Alat Laboratorium pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp15.700.000,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 Terdapat mutasi tambah pada kelompok ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp15.700.000,00 Tidak terdapat alat laboratorium yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

9) **3.09. Alat Persenjataan**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Alat Persenjataan.

10) **3.10. Komputer**

Saldo Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 297 unit dengan nilai sebesar Rp2.369.096.898,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 270 unit dengan nilai sebesar Rp1.994.220.898,00.

Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 27 unit dengan nilai sebesar Rp374.876.000,00.

Rincian data Komputer Sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
P.C. Unit	101	809.317.830,00
Note Book Acer	70	857.315.490,00
Tablet PC	1	14.190.000
Printer	86	210.474.620,00
Lap Top	4	55.297.000,00
Scanner	19	111.055.200,00
Local Area Network (LAN)	3	98.603.016,00
Peralatan Mini Komputer	5	5.087.500,00
CPU	2	4.817.000,00
External	1	660.000,00
Server	1	54.150.862,00
Router	1	53.222.059,00
Hub	2	43.905.646,00
Firewall	1	51.000.675,00
Jumlah	297	2.369.096.898,00

Tidak terdapat Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	279 Unit	Rp2.278.125.398,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat P.C	2 Unit	6.069.000,00
Rusak Berat Printer	9 Unit	22.330.000,00
Rusak Berat Note Book	7 Unit	62.572.500,00
	297 Unit	Rp2.369.096.898,00

Terdapat 2 P.C unit yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp6.069.000,00, 9 unit Printer yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp22.330.000,00 dan 7 unit Note Book yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp62.572.500,00

11) 3.11. Alat Eksplorasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Alat Eksplorasi.

12) 3.12. Alat Pengeboran.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Alat Pengeboran.

13) 3.13. Alat Produksi, Pengolahan, & Pemurnian

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

14) 3.14. Alat Bantu Eksplorasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Alat Bantu Eksplorasi.

15) 3.15. Alat Keselamatan Kerja

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1 Unit dengan nilai sebesar Rp1.540.400,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0.

Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.540.400,00.

Tidak terdapat Alat Keselamatan Kerja yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Keselamatan Kerja berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp 1.540.400,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	1 unit	Rp 1.540.400,00

Tidak terdapat kelompok Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

16) 3.16. Alat Peraga

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Alat Peraga.

17) 3.17. Peralatan Proses/Produksi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Peralatan Proses/Produksi.

18) 3.18. Rambu-rambu

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Rambu-rambu.

19) 3.19. Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode Semester II tahun 2020.

Tidak terdapat Peralatan Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 Unit	Rp 299.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	1 unit	Rp 299.000,00

Tidak ada kelompok Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

20) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.285.001.889,00, terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp6.285.488.889,00, Nilai penyusutan BMN *ekstrakomptabel* Mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar sebesar Rp487.000,00,.

d. Gedung & Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 65 unit sebesar Rp22.931.621.535,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 65 unit sebesar Rp21.653.685.535,00,

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang:

1) 4.01. Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 54 unit dengan nilai Rp21.770.547.960,00, Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 54 unit dengan nilai sebesar Rp20.737.184.960,00, Terdapat mutasi tambah pada kelompok Gedung dan Bangunan ini untuk periode Semester I tahun 2020 Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan nilai sebesar 26.125.000,00 dan Semester II tahun 2020 adanya Revaluasi BMN tahun 2020 dengan nilai

sebesar Rp1.033.363.000,00 Tidak terdapat Bangunan Gedung yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	44 Unit	Rp21.510.411.785,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	10 Unit	Rp 260.136.175,00
	54 unit	Rp21.770.547.960,00

Saldo Bangunan Gedung pada posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp21.770.547.960,00 terdapat rumah negara statusnya yang dihentikan dari penggunaannya sebanyak dari 10 unit lokasi di Komplek Seduduk Putih dengan nilai sebesar Rp260.136.175,00.

2) **4.02. Monumen**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Monumen.

3) **4.03. Bangunan Menara**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Bangunan Menara.

4) **4.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti**

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp1.134.948.575,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp.916.500.575,00 Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini untuk Periode Semester II Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp218.448.000,00 adanya Revaluasi BMN tahun 2020.

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/Pasti yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/Pasti berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	11 Unit	Rp1.134.948.575,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	11 Unit	Rp1.134.948.575,00

Tidak ada kelompok Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.492.621.241,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.185.095.940,00, mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp307.525.301,00.

e. Jalan, Irigasi, dan jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp563.356.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp569.037.000,00 Terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini dengan nilai sebesar Rp.5.681.000,00.

1) 5.01. Jalan & jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 5,263 m2 dengan nilai sebesar Rp549.340.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5,263 m2 dengan nilai sebesar Rp557.943.000,00 Terdapat mutasi Kurang pada kelompok barang ini dengan nilai sebesar Rp8.603.00,00. Adanya Revaluasi BMN Tahun 2020 Tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	5,263 M2	Rp 549.340.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	5,263 M2	Rp 549.340.000,00

Tidak terdapat kelompok Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) 5.02. Bangunan Air

Saldo Bangunan Air pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp14.061.000,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp11.094.000,00 Terdapat mutasi Tambah pada kelompok barang ini untuk

periode Semester II tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp2.922.000,00 adanya Revaluasi BMN tahun 2020.

Tidak terdapat mutasi tambah kelompok barang ini.

Tidak terdapat Bangunan Air yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat prose penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bangunan Air berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 Unit	Rp 14.016.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	6 Unit	Rp 14.016.000,00

Tidak terdapat kelompok Bangunan Air yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) 5.03. Instalasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Instalasi.

4) 5.04. Jaringan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Jaringan.

5) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 September 2020 adalah sebesar Rp478.077.433,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp449.499.089,00 dan mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp28.578.344,00-

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1.447 buah sebesar Rp78.400.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp78.400.000,00, tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 6.01. Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar

Rp63.050.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar Rp63.050.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, tidak terdapat Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bahan Perpustakaan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1.446 unit	Rp63.050.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	1.446 unit	Rp63.050.000,00

Tidak terdapat kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) 6.02. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, tidak terdapat Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp15.350.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	1 unit	Rp15.350.000,00

Tidak terdapat kelompok Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.350.000,00

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 memiliki KDP dengan nilai sebesar Rp26.125.000.

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 33 unit dengan nilai Rp118.503.000,00,.

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2) 8.01. Aset Tak Berwujud

Saldo Peralatan Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp118.503,00,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp118.503.000,00.

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	33 unit	Rp118.503.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
	33 unit	Rp118.503.000,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.064.375,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp59.251.500,00 dan mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp14.812.875,00.

3) BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

4) BMN Berupa Aset Bersejarah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.

3. BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020

a. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp126.166.490.690,00. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian:

Neraca	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Aset Lancar			
Persediaan	336.643.651	0	336.643.651
Sub Jumlah A	336.643.651	0	336.643.651
Aset Tetap			
Tanah	95.028.719.000	0	95.028.719.000
Peralatan & Mesin	7.590.032.155	487.000	7.590.519.155
Gedung & Bangunan	22.905.496.535	0	22.905.496.535
Jalan dan Jembatan, Irigasi	563.356.000	0	563.356.000
Aset Tetap Lainnya	78.400.000	0	78.400.000
KDP	26.125.000	0	26.125.000
Sub Jumlah B	126.192.128.690	487.000	126.192.615.690
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	118.503.000	0	118.503.000
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Ops. Pemerintah	0	0	0
Sub Jumlah C	118.503.000	0	0
Total	126.647.275.341	487.000	126.647.762.341

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 per Perkiraan Neraca:

Neraca	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Aset Tetap			
Peralatan & Mesin	6.285.001.889	487.000	6.285.488.889
Gedung & Bangunan	2.492.621.241	0	2.492.621.241
Jalan, Irigasi, & Jaringan	478.077.433	0	478.077.433
Aset Tetap Lainnya	15.350.000	0	15.350.000
Aset Tak Berwujud	0	0	0
KDP	0	0	0
Sub Jumlah A	9.271.050.563	487.000	9.271.537.563

Neraca	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	74.064.375	0	74.064.375
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
Sub-Jumlah B	74.064.375	0	74.064.375
Total	9.345.114.938	487.000	9.345.601.938
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
Sub-Jumlah B	0	0	0
Total	9.345.114.938	487.000	9.345.601.938

b. Perbandingan Nilai BMN pada laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMAK-BMN) dan Laporan Keuangan (SAKPA) pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 per akun Neraca adalah:

Neraca	Laporan Barang (Rp)	Laporan Keuangan (Rp)	Selisih (Rp)
Persediaan	336.643.651	336.643.651	0
Tanah	95.028.719.000	95.028.719.000	0
Peralatan & Mesin	7.590.032.155	7.590.519.155	487.000
Gedung & Bangunan	22.905.496.535	22.905.496.535	0
Jalan, Irigasi, & Jaringan	563.356.000	563.356.000	0
Aset Tetap Lainnya	78.400.000	78.400.000	0
KDP	26.125.000	26.125.000	0
Aset Tak Berwujud	118.503.000	118.503.000	0
Aset Lain-lain *)	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(9.345.114.938)	(9.345.114.938)	0
Total	117.302.160.403	117.302.647.403	487.000

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan keuangan sebesar Rp487.000,00 terjadi pada barang *ekstrakomptabel* yang tidak tercatat di neraca SAKPA.

E. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel dan ekstrakomptabel*) selama lima periode terakhir, dapat disajikan:

Periode	Nilai BMN	Perkembangan	
		Rupiah	Persen
2016	RP 39.778.623.541	RP (3.718.686.000)	(8,681 %)
2017	RP 120.309.647.551	RP 80.531.024.010	202,448 %
2018	RP 126.382.278.250	RP 6.072.630.699	5,0475%
2019	RP124.088.725.430	RP2.293.552.890	1,82 %
2020	RP126.166.490.690	RP831.635.260	0,65 %

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp.126.166.490.690,00 sudah ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp125.523.932.690,00 dan aset alat kantor dan rumah tangga yang belum ditetapkan sebanyak 55 unit sebesar Rp642.588.000,00

Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan/ Dalam Proses
1	2	3
Tanah	Rp95.028.719.000	Rp0
Peralatan & Mesin	Rp6.947.474.155	Rp642.558.000
Gedung & Bangunan	Rp22.905.496.535	Rp0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp563.356.000	Rp0
Aset Tetap Lainnya	Rp78.400.000	Rp0
Asset Tak Berwujud	Rp.118.503.000,00	
Jumlah	Rp125.523.932.690	Rp642.558.000

Pengusulan Penetapan Status Pengguna alat kantor dan rumah tangga dilakukan pada Semester I tahun 2021

b. Pengelolaan BMN Idle

Uraian	Jumlah (Unit)
Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN idle	0 Unit
Ditetapkan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0 Unit
Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0 Unit
Telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0 Unit
Selesai serah terima kepada Pengelola	0 Unit

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. **BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum**
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum.
5. **BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)**
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).
6. **Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**
 - a. **Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.
 - b. **Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak memiliki BMN dengan kondisi rusak berat yang belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.
7. **BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)**
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 tidak mengelola BMN berupa BPYBDS.
8. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Lelang kendaraan roda 4 empat sebanyak 2 Unit dengan Nilai Buku Rp45.798.000,00 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Palembang Jl. Kapten A Rivai Nomor 4 Gedung Keuangan Negara Palembang